

Education and identity formation in migrant workers children living in Indonesia's nation borders: Some descriptive notes

Luthfi Fathan Dahriyanto
Graduate Student Faculty of Psychology, Gadjah Mada University
luthfifathan@mail.ugm.ac.id

This is my additional findings of the study on the education of migrant workers children living in Nunukan municipal, East Kalimantan. Despite the access of education is somewhat difficult, the problem emerge concerning with the identity formation of the children. It is arises since many of that children are born and spent their pre-school years in the neighbor country, Malaysia. But soon after they reach 7 years old their parents sent them to attend to the elementary school in Indonesia as part of the two governments agreements. Many of the children experience identity confusion, whether they are an Indonesian or Malaysian. This circumstance is understandable, for the reason that the lacks of socialization from their parents about Indonesia, they consider that nationalism does not reflect in their day-to-day living. This finding suggests that identity formation and nationalism is seemingly not manifest in the life of the children. And it is probably also part of the consequences due to most of the children already experienced classroom education with Malaysian curriculum. This findings strengthened by their familiarity about the socioeconomic situation in the plantation, and the language used in their social interaction. This situation unfortunately for some reason to the respect of a country is regretful. It may also conclude that the absence of nationalism curriculum in education imposing relevant factor in the deconstruction of nationality senses. This article would describe the identity formation amongst elementary students and would be analyzed with social identity theory (Tajfel & Turner, 1979) and social construction as suggest by Berger & Luckmann (1966).

Keywords: education, nationalism, identity formation.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan sumber daya manusia. Peran penting pendidikan tersebut tampaknya terus di respon oleh pemerintah dengan menambah anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN. Seiring dengan itu, kualitas pendidikan secara nasional mulai ditingkatkan dengan ditetapkannya standar sertifikasi pada setiap tahapan pendidikan. Pendidikan juga dianggap sebagai sebuah upaya untuk mengembangkan identitas yang dimiliki oleh seseorang (Lopez, 2003;Coenders and Scheepers, 2003).

Pendidikan merupakan jalur yang tepat bagi setiap individu dan masyarakat untuk mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan dan dunia kerja. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi manusia untuk menjadi insan pembangunan yang

berkualitas. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu seseorang dan atau masyarakat akan mampu mengaktualisasikan seluruh daya budi yang terdapat dalam dirinya untuk menjadi produktif, dan mandiri. Dengan demikian setiap warga masyarakat akan secara aktif terlibat dan ikut serta dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan untuk kesejahteraan baik secara individual maupun bersama-sama.

Kesadaran akan makna pendidikan bagi kemajuan individu, kelompok, masyarakat, bahkan negara telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dengan pernyataan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara operasional tertulis dalam pasal 31 yang menyatakan (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Amanat yang tersirat dalam UUD 1945 ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang agama, status sosial, etnis, dan jenis kelamin.

Sebagai perwujudan dari amanat dan kesadaran akan makna penting pendidikan bagi pencerdasan kehidupan bangsa tersebut, perluasan akses memperoleh pelayanan pendidikan berkualitas merupakan program dan kebijakan pemerintah yang mesti dilaksanakan serta memperoleh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan pendidikan berkualitas dan nondiskriminasi, serta menjamin pendidikan anak yang berbasis kesetaraan kesempatan (UU No. 20 tahun 2003, pasal 11 ayat 1). Hal ini secara operasional telah menjadi salah satu pilar utama dalam rencana strategis pembangunan pendidikan tahun 2006, yaitu perihal perluasan dan penguatan akses pendidikan bagi setiap warga yang berhak memperoleh layanan pendidikan.

Berkenaan dengan layanan pendidikan bagi setiap warga tersebut, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 menyatakan bahwa, (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) warga negara di daerah terpencil dan terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ini adalah payung hukum yang memberikan jaminan bagi warga negara yang oleh keberadaannya tidak memiliki akses pendidikan secara normal (umum), berhak memperoleh layanan pendidikan secara khusus. Warga negara yang tinggal di daerah terpencil atau terbelakang, daerah perbatasan, daerah kepulauan kecil, masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan warga tidak

mampu secara ekonomi berhak memperoleh pendidikan layanan khusus dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahun 2007, terdapat banyak anak-anak TKI yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan dasar. Sementara pendidikan dasar merupakan kewajiban, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Banyak kasus ditemukan bahwa anak-anak TKI telah dipekerjakan sebagai pegawai di perkebunan sawit dan diperlakukan layaknya seperti pekerja dewasa. Masalah pendidikan muncul sebagai dampak banyaknya TKI yang bekerja di Malaysia dalam waktu yang sangat lama. Anak para TKI tidak mendapat pendidikan sebagaimana layaknya anak Indonesia yang berhak atas pendidikan. Dengan permasalahan tersebut kemudian pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan perjanjian untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak TKI, dengan mendirikan semacam sekolah darurat di daerah perkebunan sawit namun dengan menggunakan kurikulum pendidikan Malaysia.

Selain itu beberapa permasalahan yang muncul di Nunukan seringkali berpangkal pada keragaman suku penduduknya yang belum terintegrasi sepenuhnya. Masalah lain muncul berhubungan dengan lokasi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan merupakan daerah yang sering digunakan sebagai lokasi transit bagi para TKI yang akan bekerja ke Malaysia.

Berkaitan dengan permasalahan pendidikan sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah mengirim 119 guru ke daerah perkebunan di wilayah Malaysia untuk bergabung dengan LSM asing (*Humana Borneo Child Aids Society*) yang beraktivitas memberi pengajaran pada anak-anak TKI yang selama ini berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit tanpa mendapatkan pendidikan yang memadai. Namun sampai saat ini, apa yang telah dilakukan pemerintah tersebut dinilai masih sangat kurang.

Di Kabupaten Nunukan, terdapat dua yayasan swasta yang bergerak dalam kegiatan sosial kependidikan yang selama ini menampung anak-anak TKI. Jumlah anak TKI yang telah tertampung di kedua yayasan tersebut masih sangat sedikit (sekitar 200 anak) dibanding jumlah anak TKI yang belum mendapatkan pendidikan dan tinggal di perkebunan Malaysia yang berjumlah puluhan ribu.

Akses terhadap pendidikan dianggap sebagai upaya untuk mengurangi efek dari hilangnya identitas pada kelompok masyarakat ekonomi lemah dan kurang beruntung (Lopez, 3003). Kelompok pekerja migran (TKI) dapat dikatakan sebagai kelompok yang kurang mendapatkan akses yang cukup. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh orang tua, dan kurang adanya fasilitas yang mendukung untuk proses pendidikan bagi anak-anak mereka.

Nunukan merupakan daerah pintu lalu lintas TKI menuju Malaysia. Letak geografis inilah yang menjadikan daerah ini mempunyai peran yang sangat strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar. Terdapat banyak anak TKI yang berada di Malaysia, yang berlokasi tidak jauh dari Kabupaten Nunukan yang

tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Kabupaten Nunukan adalah wilayah Indonesia yang berlokasi paling dekat dengan lokasi kerja para TKI.

Ada beberapa alasan strategis berkaitan dengan pendidikan pada anak-anak TKI :

1. Terdapat sekitar 20.000-25.000 anak TKI tidak mengenyam pendidikan dasar sebagaimana mestinya. Selama ini anak-anak tersebut membantu orang tua mereka bekerja di perkebunan sawit. Mereka hidup ditengah perkebunan yang jauh dari fasilitas pendidikan. Pemerintah Malaysia tidak menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak TKI.
2. Rendahnya kesadaran para orang tua (yang notabene TKI) akan pentingnya pendidikan bagi anak. Sebagian besar dari TKI yang bekerja di daerah perbatasan (dekat dengan Kabupaten Nunukan) menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting dan tidak mendesak untuk diperjuangkan, sehingga banyak diantara orang tua yang lebih menginginkan anaknya membantunya bekerja.
3. Pendidikan dianggap sebagai suatu fasilitas yang mahal. Menurut informasi dari sumber data, para TKI yang bekerja di perkebunan hanya mendapatkan upah sekitar 7 ringgit per hari, suatu jumlah yang sangat kecil. Artinya, para TKI yang hidup dan bekerja di perkebunan Malaysia tidak bisa hidup berkecukupan, sehingga mereka berpikiran untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya.
4. Kurangnya koordinasi Departemen Pendidikan Nasional Jakarta dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, menjadikan langkah-langkah yang seharusnya sudah dilakukan sejak dulu menjadi terhambat. Pihak Dinas Pendidikan tidak berani mengambil langkah-langkah kongkret karena permasalahan yang ada menyangkut urusan antarnegara (bukan sekadar antarkabupaten di Indonesia) yang hendaknya diketahui dan diawasi oleh Pemerintah pusat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa tidak semua anak TKI belum mengenyam pendidikan. Di kawasan perkebunan tempat para TKI bekerja dan tinggal, terdapat NGO (*Non Governmental Organization*) yang memberikan semacam kursus dengan model kelompok belajar. Namun menurut informasi dari guru Indonesia yang mengajar di Malaysia, NGO yang menyelenggarakan kegiatan ini nampaknya perlu banyak dikritisi dan di evaluasi.

Kegiatan pendidikan yang dijalankan melalui model kelompok belajar sepertinya tidak maksimal karena situasi dan lokasi yang tidak kondusif untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Situasi yang tidak mendukung tersebut banyak disebabkan oleh tempat pendidikan yang berada dalam kompleks perkebunan tidak memberi suasana belajar yang baik bagi anak-anak. Target pembelajaran yang ada di sana pun terkesan ala kadarnya, tanpa tujuan pembelajaran yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Banyak sumber data menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak TKI jauh dari kata ideal. Pemerintah Malaysia belum memberi izin tentang diberlakukannya kurikulum pendidikan dasar Departemen Pendidikan Nasional RI untuk diberlakukan di sana. Selama ini, guru-guru yang telah dikirim kesana hanya ditugasi untuk mengajarkan baca-tulis-hitung.

Para aktivis NGO yang kebanyakan berasal dari Denmark, sebagai para penyelenggara pendidikan untuk anak-anak TKI pun dirasa tidak memiliki kapasitas yang baik sebagai guru bagi anak-anak Indonesia. Ditemukan beberapa masalah yang muncul dari moral staf-staf pengajar dari NGO tersebut, misalnya: masalah pelecehan seksual yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.

Diskusi

Pendidikan mempunyai peran strategies dalam pembentukan nasionalisme. Pendidikan adalah proses nasionalisasi (Lacombe, 1997: 311) dan alat yang dapat menjadikan orang menjadi “keseluruhan yang dibayangkan” (Spring, 2004: 4). Kemudian pendidikan juga diyakini sebagai kendaraan utama (Wiborg 2000: 236) untuk nasionalisme dikembangkan. Ide tentang nasionalisme dalam pendidikan juga menjadi perhatian utama bapak pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara, ketika ia menyatakan, kembali dari barat ke prinsip nasional (Dewantara, 1967: 157).

Pendidikan merupakan sebuah upaya untuk melakukan pembentukan identitas (MacNeill, 2000). Selanjutnya pada aspek yang lain pembentukan identitas merupakan sebuah keharusan dalam konteks negara karena seringkali identitas nasional kewarganegaraan hanya menjadi milik sekelompok warga yang dominan (Abu Saad, 2006). Identitas sosial menurut Tajfel & Turner (1979) menyatakan bahwa individu cenderung mendefinisikan diri untuk memperluas dan mengembangkan diri dalam kelompok sosial dan cenderung untuk mencari identitas sosial yang positif. Identitas sosial juga seringkali terdiri dari seluruh aspek dari citra diri yang dimiliki individu. Selanjutnya individu mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan identitas sosial yang positif dengan berusaha membandingkannya dengan kelompok lain untuk menemukan nilai pembeda positif antar kelompok.

Selanjutnya teori identitas sosial akan cenderung menitikberatkan kepada favoritisme terhadap kelompok (*in-group favouritism*), artinya kelompok sendiri akan terlihat cenderung lebih baik daripada kelompok lain dan keadaan ini akan memunculkan kepuasan pada diri individu. Namun sebaliknya apabila perbandingan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kelompok lain mempunyai pembeda positif yang lebih tinggi maka akan terjadi suatu keadaan dimana individu akan merasa tidak puas dengan kelompoknya.

Identitas sosial yang dimiliki oleh seseorang merupakan sebuah proses yang berjalan dan berlangsung terus menerus, pembentukan identitas dimulai sejak masa kanak-kanak seperti yang disampaikan oleh Erikson (Papalia, et. Al,

2002). Identitas individu sangat berkaitan dengan etnisitas, dan seringkali mempunyai peran yang sentral (Papalia, et. Al, 2002). Menurut Elkind (Papalia, et. Al, 2002) pembentukan identitas seseorang kadang-kadang tidak mencapai kesempurnaan karena perbedaan jalur pembentukan identitas. Jalur pertama, seringkali dianggap sebagai pembentukan identitas yang sehat melalui diferensiasi dan integrasi, yaitu menjadi peka terhadap perbedaan yang ada disekitarnya dan kemudian mampu mengintegrasikan perbedaan tersebut menjadi sebuah keutuhan yang lengkap dan unik. Kemudian jalur kedua dianggap sebagai jalur yang akan memunculkan identitas yang kurang ideal karena menggunakan proses substitusi. Pada jalur ini individu melakukan pergantian dengan mengambil ide-ide, perasaan dari sikap, komitmen dan kepercayaan orang lain. Keadaan ini cenderung akan memunculkan konflik dan pertentangan sehingga berakibat pada identitas yang kurang menyeluruh dan matang.

Anak-anak TKI yang berusia sekitar 7-12 tahun masih berada pada tahap pembentukan identitas, atau dalam tahapan perkembangan yang disampaikan oleh Erikson, masuk kedalam tahapan *identity versus identity confusion*. Keadaan ini terbentuk karena anak-anak TKI sejak dilahirkan langsung hidup di dalam lingkungan yang perkebunan sawit dan berada di negara Malaysia. Namun secara identitas kewarganegaraan mereka adalah orang Indonesia, karena berasal dari orang tua yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Tetapi situasi berbeda dialami. Di wilayah perkebunan sawit, anak-anak TKI terbiasa dengan perilaku yang lebih dekat dengan kebiasaan orang-orang Malaysia. Salah satu hal yang utama adalah mengenai bahasa, kebanyakan bahasa percakapan sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Melayu, yang mempunyai logat dan beberapa kata berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa seringkali dianggap sebagai bagian dari pembentukan identitas, karena melalui bahasa seseorang akan mengkonstruksi, melakukan negosiasi, dan melakukan komunikasi identitas dengan orang lain (Howard, 2000).

Pengalaman lain juga memperkuat terjadinya kebingungan identitas yang dimiliki, menurut penuturan dari salah seorang guru, anak-anak TKI di perkebunan mendapatkan kurikulum pendidikan Malaysia, sehingga menguatkan bahwa mereka hidup dalam negara Malaysia. Kerancuan identitas ini terlihat ketika beberapa anak-anak menyatakan bahwa mereka sebenarnya menginginkan untuk hidup di negara, lebih spesifik untuk tetap berada dalam lingkungan perkebunan sawit. Aspirasi masa depan ini selain disebabkan karena anak-anak tersebut kurang mendapatkan wawasan mengenai kehidupan yang cukup juga karena sudah terjadi familiarisasi terhadap dunia perkebunan sawit. Pada situasi ini terlihat bahwa aspirasi terhadap masa depan sangat berkaitan dengan konstruksi sosial yang ada di sekitar individu. Konstruksi sosial merupakan ide mengenai sebuah keadaan yang diterima oleh anggota masyarakat pada waktu tertentu dengan dasar asumsi-asumsi dan persepsi subjektif yang disepakati bersama (Papalia, et.al, 2002), atau menurut Gergen bahwa suatu keadaan merupakan sebuah fakta yang relative (Liebrucks, 2001).

Terbentuknya identitas seseorang juga sangat tergantung dari konstruksi

sosial yang dimana individu itu berada. Menurut Berger & Luckmann (1966), Liebrucks (2001) ada beberapa hal yang menyertai pemahaman mengenai konstruksi sosial mengenai dunia. Beberapa aspek tersebut adalah:

- a. Kepercayaan terhadap suatu kenyataan terbentuk melalui interaksi sosial. Pada konteks ini interaksi sosial memegang peranan penting dalam pembentukan kenyataan.
- b. Institusi sosial dan kedirian seseorang terbentuk melalui interaksi sosial. Pada konteks ini interaksi sosial bukan hanya menentukan makna dari suatu kenyataan tetapi juga berkaitan dengan fakta objektif pada institusi sosial dan kedirian seseorang.
- c. Kepercayaan terhadap kenyataan yang terbentuk melalui interaksi sosial mempunyai peranan penting dalam pembentukan kembali institusi sosial dan kedirian seseorang.

Menurut pemahaman dari ketiga tesis yang disampaikan oleh Berger & Luckmann (1966) maka dapat disimpulkan bahwa pada aspek personal yang dimiliki oleh anak-anak TKI tersebut terjadi proses pembentukan realitas mengenai dunia yang mereka hadapi. Pada keadaan ini anak-anak berada dalam situasi dimana dalam lingkungan perkebunan sawit ia berada pada kondisi lingkungan orang dewasa pekerja dan aturan-aturan yang berada di dalamnya. Sehingga informasi yang dikumpulkan dan dibentuk mengenai realitas juga berasal dari interaksi sosial mereka dengan orang dewasa (orang tua) atau pekerja lainnya. Bahkan beberapa guru yang mengajar di perkebunan sawit menyatakan pekerja anak-anak mudah ditemui di lingkungan perkebunan karena selain orang tua yang mengajak mereka, menghasilkan uang adalah lebih penting daripada sekolah.

Selain itu lingkungan perkebunan merupakan sebuah komunitas yang berbeda dari sekitarnya. Artinya, institusi-institusi yang berperan juga berbeda. Pada lazimnya ditemui pada sebuah komunitas masyarakat, sekolah adalah institusi resmi bentukan yang bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan formal individu. Lingkungan perkebunan sawit tidak mengenal itu, setiap hari mereka dihadapkan pada situasi kerja, aturan, mandor dan pemilik/pengelola. Institusi sosial pendidikan belum lama masuk, setelah ada beberapa Lembaga swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan anak-anak TKI. Bagi komunitas pekerja perkebunan sawit ini merupakan institusi baru, namun tidak terbentuk dari interaksi sosial mereka, namun lebih sebagai institusi baru yang muncul dalam komunitas mereka. Realitas baru ini dalam proses interaksi sosial kemudian menjadi sebuah kesadaran bersama pada orang tua untuk mulai memikirkan pendidikan anak-anaknya.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan tersebut selanjutnya menjadikan beberapa orang tua mengirimkan anak-anaknya ke Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih baik dan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengembangan kognitif anak. Namun, permasalahan lain muncul disebabkan oleh anak-anak yang mempunyai aspirasi terhadap pendidikan yang rendah.

Karena mereka hidup dalam lingkungan yang kurang ketat dalam aturan, cenderung bebas dan tidak ada figure yang mengingatkan, mereka membutuhkan penyesuaian untuk mengikuti aturan sekolah. Beberapa pernyataan dari guru menunjukkan bahwa kebanyakan anak-anak TKI mengalami kesulitan dalam mengikuti tata tertib sekolah, bahkan untuk sebuah aktivitas yang sederhana duduk dengan benar dengan kaki tidak diangkat ke kursi.

Pendidikan dilakukan untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi hidup (Shofan, 2007). Pendidikan pada anak-anak TKI di Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh dua yayasan sosial keagamaan yaitu Pesantren Hidayatullah dan Yayasan Gabriel. Model pendidikan yang dikembangkan menggunakan pendekatan agama dan pelajaran umum. Pendidikan agama sebenarnya juga dapat memperkuat identitas nasional seseorang, misalnya di beberapa negara Eropa pendidikan agama dianggap sebagai upaya untuk membentuk identitas nasional (MacNeill, 2000). Selain itu dalam pendidikan, materi mengenai kewarganegaraan menjadi penting ketika situasi masyarakat menjadi semakin tidak terbatas, dan pada lingkungan imigran (Banks, 2008).

Simpulan

Peran pendidikan dalam pembentukan identitas nasionalisme anak-anak TKI mempunyai peran yang sentral. Pada konteks yang sederhana identitas kebangsaan dapat dijelaskan melalui dua mekanisme yang dijelaskan oleh Thomson dan Benedict Anderson (Faturochman, 2008). Mekanisme pertama identitas kebangsaan dikembangkan melalui banal nationalism, yaitu mengembangkan identitas nasional dengan perpektif lokal dan berbentuk banal, melalui slogan dan symbol-simbol tetapi kurang jelas, spesifik dan realistis. Kemudian yang kedua menurut Anderson (2001), bangsa merupakan sebuah komunitas yang terbayang (*imagined communities*) dimana anggota-anggotanya tidak saling tahu dan kenal antara satu dengan yang lain, jarang bertemu bersama, mendengarkan satu dengan lainnya secara langsung tetapi kehidupan mereka ada dalam pikiran.

Pembentukan identitas dilakukan melalui sebuah konstruksi sosial, menurut Berger & Luckmann (1966, Patterson & Keefe, 2008) konstruksi sosial terbentuk melalui tiga tahapan yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi digambarkan sebagai proses oleh orang-orang untuk membangun sebuah produk budaya atau hasil (Misalnya, identitas seseorang terbentuk karena interaksi dengan orang tua). Objektifikasi terjadi ketika produk-produk budaya mengambil tujuan realitas mereka sendiri, terpisah dari orang-orang yang menciptakan mereka, sehingga yang dilihat sebagai bagian dari realitas objektif. Internalisasi terjadi dengan cara sosialisasi ketika orang-orang dalam masyarakat belajar "fakta objektif" dari suatu budaya dan membuat bagian ini menjadi fakta-fakta kesadaran mereka sehari-hari, atau "internal." Akibatnya,

realitas sosial terus sedang dibangun dan direkonstruksi dalam dialektika proses antara individu berinteraksi satu sama lain dan dengan dunia sosial mereka.

Kebingungan identitas yang dimiliki oleh anak-anak TKI terjadi karena mereka sejak kecil telah dikonstruksi secara familiar dengan kebiasaan sebagai orang Malaysia, namun secara legal mereka adalah warga negara Indonesia. Selain itu kebingungan ini juga dikuatkan oleh adanya pikiran bahwa mereka mempunyai aspirasi masa depan untuk juga bekerja sebagai pekerja di perkebunan sawit.

Pendidikan untuk anak-anak TKI pada dasarnya selain memberikan bekal keilmuan juga seharusnya mengikutsertakan materi mengenai kewarganegaraan sehingga tidak terjadi kebingungan dalam identitas yang dimiliki. Selain itu peran kebijakan pemerintah menjadi sangat penting dalam menyediakan pendidikan yang memadai dan layak bagi anak-anak TKI. Secara operasional pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan berupa penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bagi anak-anak TKI dengan memberikan payung kerjasama antarnegara sehingga pemerintah daerah Nunukan melalui Dinas Pendidikannya dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tanggap.

Selanjutnya hambatan berkaitan dengan proses penyesuaian diri siswa anak-anak TKI. Secara psikologis masalah ini perlu dipecahkan dengan mengupayakan pembekalan bagi guru-guru dengan kemampuan konseling yang cukup baik untuk membantu siswa mempercepat proses penyesuaian dirinya sehingga membantu untuk mematangkan identitas dirinya.

Identitas pada dasarnya merupakan sebuah konstruksi yang terus berlangsung, sehingga merupakan sesuatu yang cair (*fluid*) dan dinamis, bukan merupakan sesuatu yang menetap atau sebuah ilusi (Faturachman, 2008). Pada konteks ini peran pendidikan menjadi strategis untuk menumbuhkan perasaan identitas diri atau identitas kebangsaan. Selain itu pendidikan juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap aspirasi masa depan yang dimiliki oleh anak dalam mempersiapkan kehidupannya.

Daftar Pustaka

- Lopez, Jaume Saramana, 2003. Nationalism, education and basic competencies. *Prospects*, Vol.XXXIII. No. 3
- Coenders, Marcel & Scheepers, P. 2003. The effect of education on nationalism and ethnic exclusionism: an international comparison. *Political Psychology*. 24 (2), 313-343
- Lacombe, G. (1997). Nationalism and education in Latvia, 1918-1940. *Journal of Baltic Studies*, 28(4), 309 - 338.
- Spring, J. (2004). *How Educational Ideologies Are Shaping Global Society? Intergovernmental Organizations, NGOs, and the Decline of the Nation-State*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Wiborg, S. (2000). Political and Cultural Nationalism in Education. The Ideas of Rousseau and Herder Concerning National Education *Comparative Education*, 36(2), 235-243.
- Dewantara, K. H. (1967). Some Aspects of National Education and the Taman Siswa Institute of Jogjakarta. *Indonesia*, 4, 150-168.
- MacNeill, D. (2000). Religious education and national identity. *Social Compass* 47(3), 343–351
- Abu Saad, I. (2006). State-controlled education and identity Formation among the Palestinian Arab minority in Israel. *American Behavioral Scientist*. 49(8), 1085-1100
- Tajfel, H & Turner, J. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. in Austin, William G.; Worchel, Stephen. *The Social Psychology of Intergroup Relations*. Monterey, CA: Brooks-Cole. pp. 94–109.
- Papalia, Diane E, Olds, Sally Wendkos, Feldman, Ruth Duskin. 2004. *Human Development 9th edition*. New York: McGraw Hill
- Howard, J.A. (2000). Social psychology of identities. *Annual Review of Sociology*. 26. 367-393.
- Liebrucks, A.(2001). The concept of social construction. *Theory & Psychology*, 11(3), 363-391.
- Berger, P. L & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality*. New York: Anchor Books
- Shofan, M. (2007). *The Realistic Education*. Yogyakarta: Ircisod dan LPPM

- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129-139.
- Faturochman. (2008). Model-model psikologi kebhinnekatunggalikaan dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 1, 61-72.
- Anderson, B (2001). *Komunitas-komunitas terbayang*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Patterson, D.A & Keefe, R. H. (2008). Using social construction theory as foundation for macro level interventions in communities impacted by HIV and addictions. *Journal of Sociology and Social Welfare*. XXXV (2). 111-126